

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sampai 2022 belum mengakui terjadinya pelanggaran prinsip non-diskriminasi sehingga pemenuhan prinsip non-diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur belum terpenuhi dan berlindung dibalik kedaulatan negara, namun beberapa negara barat sudah menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah RRC, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mendesak Pemerintah RRC untuk mengakui perbuatannya serta menerima sanksi sebagai akibatnya,

- a. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi dukungan masyarakat, dengan memanfaatkan kekuatan virilitas dan jangkauan yang luas dari media sosial maka pesan untuk mengakhiri pelanggaran HAM yang dialami etnis Muslim Uighur dengan mencapai audiens global. Konten yang berisi foto, video yang dapat menarik empati public secara luas.
- b. Mengadakan aksi damai, kampanye dan kegiatan advokasi lainnya yang menjadi sarana untuk menarik perhatian public dan pembuat kebijakan, dengan mengorganisir demonstrasi yang damai, petisi. Gerakan ini dapat menciptakan momentum untuk perubahan.

- c. Melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti selebriti dan pemimpin agama adalah strategi yang sangat efektif, dukungan mereka bisa membawa perhatian media dan mampu mencapai audiens yang tidak bisa dicapai secara luas.
- d. Membangun hubungan yang damai dan baik dengan organisasi sipil masyarakat lainnya yang menjadi kunci dalam memperkuat solidaritas dan kekuatan gerakan. Adanya kerjasama dengan kelompok HAM, agama dan akademisi untuk memperluas jaringan dukungan dan kekuatan suara.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pelanggaran prinsip non diskriminasi yang dilakukan oleh China terhadap etnis Muslim Uighur, maka penulis menyarankan Pemerintah RRC untuk segera mengakui perbuatan diskriminasi yang telah dilakukannya kepada etnis Muslim Uighur, menjunjung tinggi nilai keadilan dan HAM kepada warga negaranya tanpa melihat suku, agama, ras dan bahasa serta meratifikasi konvensi Genewa 1951

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional UNHCR Indonesia*, Sanic Offset, Bandung.
- Arienne M. Dwyer, 2005, *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse*, Washington: East-West Center Washington,
- Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia : Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Brillan Internasional, Surabaya.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global Edisi Kedua*, Bandung.
- Choirul Anam, dkk, 2016 *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*, Komnas HAM RI, Jakarta
- Enny Soeprapto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Natasha Parassram Concepcion, 2000, "Human Rights Violations Against Muslims in the Xinjiang Uighur Autonomous Region of Western China," Human Rights Brief 8, no. 1
- Strake J.G, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi 10, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional.*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta

Jurnal

- Che mohd aziz bin yaacob nor azura a Rahman, "konflik uighur di xinjiang, china: pemahaman dari sudut pendekatan segi tiga konflik galtung *The Uighur Conflict in Xinjiang, China: Understanding from the Perspective of the Galtung's Conflict Triangle Approa*
- Dewi, N. R., Irsyad, M., Mufarikhin, & Feriansyah, A. M, 2020. *Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina. Jo ch*" urnal of Social Science Teachin
- Endah Rantau Itasari, 2021, "Legal Protection Of Uighur Muslim Ethnics In China," Lamlaj, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

- Muchammad Nur Imani Khairullah, Joko Setiyono, "Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genocide Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang"
- Ijtimaiya, "Journal of Social Science Teaching", Vol. 4 No. 1 Tahun 2020 Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Kudus
- Aryuni Yuliantiningsih "PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI DOMESTIK MENURUT HUKUM HUMANITER DAN HAK ASASI MANUSIA" Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Nicken Sarwo Rini "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM PERATURAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (Analysis Implementation of The Principle of Non-Discrimination in Regional Regulation in Education and Health Services)"
- Nur Kholis, 2018, "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court", Jurnal Legality, Vol. 26 No. 2, Universitas Airlangga.
- Yogi Zul Fadhli, 2014, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, Juni 2014, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hasil Penelitian

- Wahyu Fathurrahman, 2019 "Kebijakan HAM Internasional Terhadap Praktik Diskriminasi di Xianjiang China", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Fadhilatur Rosyidah, 2020 "Persekusi Muslim Uighur Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
- Syarif Hidayatullah Muhammad Fajrin Saragih, 2015 "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Humaniter", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Peraturan

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Konvensi Genewa 1951 tentang Status Pengungsi
- Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi
- Resolusi PBB Nomor 47/135 pada 18 Desember 1992 tentang Hak-hak Orang-orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional

Internet

- CNN Indonesia, 2018 PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181206203220-113-351721/pbb->

- [desak-china-buka-akseske-kamp-konsentrasi-uighur](#), diakses pada 02 Oktober 2024.
- Detik, 2021 Negara Barat Jatuhkan Sanksi Ke China Atas Pelanggaran HAM Muslim Uighur <https://news.detik.com/bbc-world/d-5503922/negara-barat-jatuhkan-sanksi-ke-china-atas-pelanggaran-ham-muslim-uighur>, diakses pada 27 oktober 2024.
- BBC News Indonesia, 2021, Membalas sanksi atas penyiksaan orang Uighur, China larang sejumlah anggota parlemen Inggris di wilayahnya, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56536189>, diakses 3 november 2024.
- BBC News Indonesia, 2021, China diganjar sanksi oleh negara-negara Barat atas “pelanggaran HAM” terhadap Muslim Uighur <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56456176>, diakses 4 november 2024.
- BBC News Indonesia, 2022, Muslim Uighur di China : Dokumen kepolisian ungkap penahanan massal serta kebijakan tembak di tempat bagi yang coba kabur <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61570181>, diakses 8 november 2024 .
- Dosen Sosiologi, 2023, Pengertian Perkusi, Unsur, penyebab, dampak dan contohnya <https://dosensosiologi.com/pengertianpersekusi/> , diakses 4 november 2024.
- BBC, 2018, Muslim Uighur Dan Perlakuan Pemerintah China Terhadap Mereka, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638>, diakses 19 Februari 2025.
- BBC News Indonesia, 2021, China Diganjar Sanksi Oleh Negara-Negara Barat Atas Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56456176> , diakses 25 Februari 2025
- ADHOC , Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional ” [adhoc//.coe.int//](http://adhoc.coe.int/), diakses pada 8 Maret 2025







